

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelara Profesi Ahli Madya



Disusun Oleh:

**ENSIWI HIDAYATI
10409131037**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Disusun Oleh:

**ENSIWI HIDAYATI
10409131037**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal ...15... Mei 2013

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Koordinator Program Studi
Akuntansi DIII


Ani Widayati, M.Pd.
NIP. 19730908 200112 2 001

Dosen Pembimbing


Isroah, M.Si.
NIP. 19660704 199203 2 003


Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates




Dapan, M.Kes.
NIP. 19571012 198502 1 001

TUGAS AKHIR

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Ensiwi Hidayati

10409131037

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi

Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal 24 Mei 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua merangkap anggota

Isroah, M.Si.

Sekretaris merangkap anggota

Ani Widayati, M.Pd.

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 0024

Dapan, M.Kes.

NIP. 19571012 198502 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ensiwi Hidayati

NIM : 10409131037

Program Studi : Akuntansi D III

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 12 Mei 2013

Yang menyatakan,

(Ensiwi Hidayati)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Deskripsi Teori.....	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Pengelompokan Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak	10
e. Pengertian Penghasilan	11
f. Pengertian Pajak Penghasilan	12

g. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	12
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
b. Pengertian Wajib Pajak	14
c. Pengertian Orang Pribadi	14
d. Wajib Pajak Orang Pribadi	15
e. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan	16
c. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi	17
d. Fungsi Surat Pemberitahuan	17
e. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan	18
f. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan.....	20
g. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan	20
B. Kerangka Berfikir	21
C. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
B. Desain Penelitian.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Data yang Dibutuhkan	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Deskripsi Tempat Penelitian	28
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	28

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak	31
3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.....	32
4. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.....	34
5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	34
6. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	36
7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	38
8. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.....	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
1. Hasil Penelitian.....	43
a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2012 pada KPP Pratama Yogyakarta	43
b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 Tepat Waktu, pada KPP Pratama Yogyakarta	45
c. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak PPh di KPP Pratama Yogyakarta	46
d. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh	47
2. Pembahasan.....	50
a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di KPP Pratama Yogyakarta	50
b. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Yogyakarta	54

c. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	13
2. Data Jumlah Penduduk serta Persentase Penduduk yang Memiliki NPWP...	36
3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2010-2012.....	44
4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu, Tahun Pajak 2010-2012	45
5. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	50
6. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010-2012	51
7. Norma Absolut Skala Lima	52
8. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010-2012	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	34
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pemberian Izin Riset Kanwil DJP D.I.Yogyakarta	69
2. Surat Pemberian Izin Penelitian KPP Pratama Yogyakarta	70
3. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S	71
4. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS	72
5. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770.....	73
6. Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 1721-A1	74
7. Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 1721-A2	75
8. Tanda Terima SPT Tahunan	76
9. Bukti Penitipan (Pelaporan) SPT Tahunan Secara Kolektif	77

MOTTO

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”(QS. Al An'aam: 162).

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."(QS. An Naml: 19).

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (QS. Ali 'Imran: 8).

ABSTRAK

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Oleh:

Ensiwi Hidayati
10409131037

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, (2) Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta yang terletak di Jalan Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh, kemudian dikonsultasikan dengan Norma Absolut Skala Lima. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Yogyakarta Tahun Pajak 2010 sampai dengan Tahun Pajak 2012 adalah 49,34%, 55,65%, dan 48,05% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif, (2) Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu memberikan penyuluhan tentang perpajakan, memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dan mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dengan beberapa cara.

Kata kunci: kepatuhan, pelaporan, SPT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir yang berjudul: “Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta” ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Keberhasilan dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dapan, M.Kes., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
4. Ani Widayati, M.Pd., Koordinator Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Isroah, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

6. Arridel Mindra, SP.I., M.Si., Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
7. Iwang Kurniawan, S.E., Pegawai Seksi PDI KPP Pratama Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk membagi informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa mendukung, memberi semangat serta doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 4 Mei 2013

Penyusun,

(Ensiwi Hidayati)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Nasional memerlukan dana/modal yang tidak sedikit sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat diandalkan. Untuk memperoleh dana yang besar, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan salah satu yang termasuk dalam APBN yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan potensi terbesar bagi sumber penerimaan negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak, oleh karena itu pemerintah lebih mengoptimalkan peran dari sektor pajak. Pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi karena sejalan dengan perkembangan yang ada dan disadari

bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-undang perpajakan diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2011:19). Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau belum, pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Namun, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Yogyakarta masih ditemui permasalahan, antara lain seperti Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, SPT tidak lengkap, kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh, adanya hambatan yang mempengaruhi

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, serta upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Prosedur penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi kurang efektif.
3. Adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
4. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Negeri Yogyakarta serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

3. Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penulis dalam meneliti Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut sudut pandang mereka masing-masing. Namun satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2011: 1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Adriani (Fidel, 2010: 4):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran/kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran/kontribusi dari rakyat kepada negara.
- 2) Berdasarkan Undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011: 7) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Pengertian Penghasilan

Pengertian Penghasilan menurut Undang –undang PPh Pasal 4 ayat (2) (Soemarso S. R. , 2007: 175),

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun”.

Pengertian penghasilan Menurut Casavera (2009: 84):

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

f. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2011: 74), “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Erly Suandy (2008: 45), “Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.”

Dari kedua pengertian pajak penghasilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subyek pajak (yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

g. Tarif Pajak PenghasilanWajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

(Sumber: Waluyo, 2010: 112)

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005:148), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138):

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari; kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu (2005:148), yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

b. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Siti Resmi, 2011: 18), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

c. Pengertian Orang Pribadi

Pengertian orang pribadi menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011: 164), “Orang Pribadi sebagai subyek pajak dapat

bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.”

Menurut Mansury R, salah seorang Konseptor UU PPh 1983, Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (*natuurlijk persoon*). Jadi, yang dimaksud dengan Orang Pribadi dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup. Kata Orang Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud Orang Pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah udzur (Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004: 21).

d. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

- 1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya, PNS dan Non PNS.
- 2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Non Karyawan ini adalah WP Orang Pribadi Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu

Dagang, Jasa, dan Industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, dll (*Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 06/PJ/2012*).

e. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Atau menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010: 123):

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Siti Resmi (2011: 43), “Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.”

Menurut Waluyo (2010: 38), “SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.”

c. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Casavera (2009: 14), “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi.”

d. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berikut ini adalah fungsi surat pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011: 31):

1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

- c) harta dan kewajiban; dan/atau
- d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

e. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011: 32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau

mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.

- 2) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- 3) Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.

c) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

f. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak orang pribadi menurut Mardiasmo (2011: 35), “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011: 36), sanksi terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak orang pribadi.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Kerangka Berfikir

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi

melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir. Namun dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kepatuhan baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Penerimaan pajak akan berbeda signifikan apabila kepatuhan Wajib Pajak sudah ditegakkan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain tingkat kesadaran dan pengetahuan yang kurang dari Wajib Pajak, ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Wajib Pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya pemerintah untuk menegakan ketertiban pajak harus dilakukan secara optimal agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan dengan

berbagai perbaikan pelayanan serta sosialisasi kepada Wajib Pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak, fasilitas dan pengendalian menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal perpajakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika faktor kepatuhan Wajib Pajak bisa diperbaiki, diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh tahun 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
2. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu, tahun pajak 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
3. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
4. Apa saja upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang terletak di Jalan Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta. Peneliti melaksanakan penelitian ini pada bulan April 2013.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan harus selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data yang diperoleh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir keberadaan data merupakan suatu hal yang sangat penting, karena suatu data yang benar, relevan, jelas dan lengkap akan membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pegawai Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Dalam metode ini peneliti memperoleh data berupa:

- a. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat, menggandakan, membaca, dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut berupa:

- a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh tahun 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.
- b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu, tahun pajak 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

D. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah:

1. Data Umum

Data umum yaitu data yang merupakan dasar penting untuk memahami perusahaan atau instansi yang diteliti. Data umum yang dibutuhkan meliputi:

- a. Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
- b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
- c. Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

2. Data Khusus

Data khusus yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas yaitu data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2012.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau angka-angka yang diteliti yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)

Keterangan:

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu

Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh :

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor pajak di Indonesia telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien van financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diganti namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu kantor Penetapan Pajak diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung selama 26 tahun. Namun, karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama. Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul.

Reorganisasi Direktorat Jendral Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta. Namun mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Peresmian kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas

gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan kantor Pajak yang bercorakkan Kantor Pelayanan Pajak Modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang struktur organisasinya berdasarkan fungsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima dan pengawasan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak agar terwujud kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki 2 (dua) buah gedung seluas 3.588 m². Deskripsi mengenai kedua gedung tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Gedung A

- 1) Lantai 1 terdiri dari ruang Seksi Pelayanan, Tempat Pelayanan Terpadu, Help Desk, Bank BRI, Bank BPD DIY, Ruang WP Prioritas, dan Ruang berkas.
- 2) Lantai 2 terdiri dari Sekretariat Kepala Kantor, Ruang Rapat, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan Sub Bagian Umum.

- 3) Lantai 3 terdiri dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III, Waskon IV, dan Seksi Penagihan.

b. Gedung B

- 1) Lantai 1 terdiri dari musholla, toilet, kantin, ruang genset, ruang pompa, dan tempat parkir.
- 2) Lantai 2 terdiri dari Seksi Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa, dan ruang poliklinik.
- 3) Lantai 3 terdiri dari Ruang Aula KPP Pratama Yogyakarta.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”

Pada dasarnya ada 3 cita – cita utama yang ingin dituju, yaitu:

- 1) Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit dan instansi pemerintah lainnya.
- 2) Berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan atas standar internasional baik untuk kelas aparatnya maupun kualitas kerja dan hasilnya.
- 3) Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang mereflesikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa

eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat mampu memenuhi harapan serta cita-cita yang baik dan bersih.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”

3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

PRASAJA (PasTI, Ramah, Santun, Bersahaja), motto pelayanan mengandung arti sederhana, apa adanya, dan tidak dikurang kurangi.

Filosofi :

- a. PRASAJA merupakan salah satu nilai muatan lokal “*Javanese Wisdom*”, selaras dengan lingkungan kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan Kraton sebagai ikonnya.
- b. PRASAJA Mencerminkan sikap mental perilaku kesederhanaan dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku (menjunjung tinggi asas kepatutan dan kepatutan serta dalam koridor aturan, etika, dan tata karma yang berlaku).
- c. PRASAJA, merupakan kependekan dari :
 - 1) PasTI (Profesional, Integritas, *Teamwork*, Inovasi)

Menunjuk pada Nilai-nilai Organisasi DJP yang diimplementasikan oleh para pegawai KPP Pratama Yogyakarta.

2) Ramah

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang menjunjung tinggi keramahan, rasa nyaman dan akrab.

3) Santun

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan tata karma baik dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku.

4) Bersahaja

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang mendasarkan diri pada sifat-sifat kesederhanaan dalam bertindak dan berpenampilan tanpa mengabaikan unsur -unsur kepatutan, kewajiban, dan kerapihan.

4. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta



Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Makna logo:

- a. Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Rakca” memiliki arti sebagai penghimpun dana.
 - b. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
 - c. Bentuk kipas melambangkan bersih.
 - d. Bentuk sayap melambangkan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.
- #### 5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
- a. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY). Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo.

b. Data Kependudukan

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Data jumlah penduduk serta persentase penduduk yang memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk serta Persentase Penduduk yang Memiliki NPWP

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK Non Miskin	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Penduduk ber-NPWP (%)
Danurejan	31.704	6.774	5.191	3.499	67,41%
Gedongtengen	26.884	5.562	3.993	3.231	80,92%
Gondokusuman	76.078	13.648	11.726	9.508	81,08%
Gondomanan	17.462	5.325	4.111	3.045	74,07%
Jetis	37.990	7.150	5.255	4.643	88,35%
Kotagede	32.485	7.359	5.506	5.216	94,73%
Kraton	29.475	6.930	5.687	4.656	81,87%
Mantrijeron	41.971	8.021	6.136	6.776	110,43%
Mergangsan	42.674	8.455	6.504	6.194	95,23%
Ngampilan	23.634	4.737	3.533	3.406	96,41%
Pakualaman	14.942	11.942	11.187	2.308	20,63%
Tegalrejo	42.195	8.741	6.334	5.915	93,38%
Umbulharjo	74.948	17.446	14.311	12.556	87,74%
Wirobrajan	31.873	7.050	5.239	4.737	90,42%
Jumlah	524.315	119.140	94.713	75.690	79,92%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Tahun 2013).

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Dipimpin oleh Bapak Arridel Mindra, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta. Tugas

pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki tugas pokok dalam melakukan kegiatan operasional di bidang pajak negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), sedangkan kebijakan teknis yang dimaksud adalah kegiatan operasional dalam penetapan pajak, misalnya pelayanan perpajakan, restitusi, pemungutan pajak, dan lain-lain.

b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut :

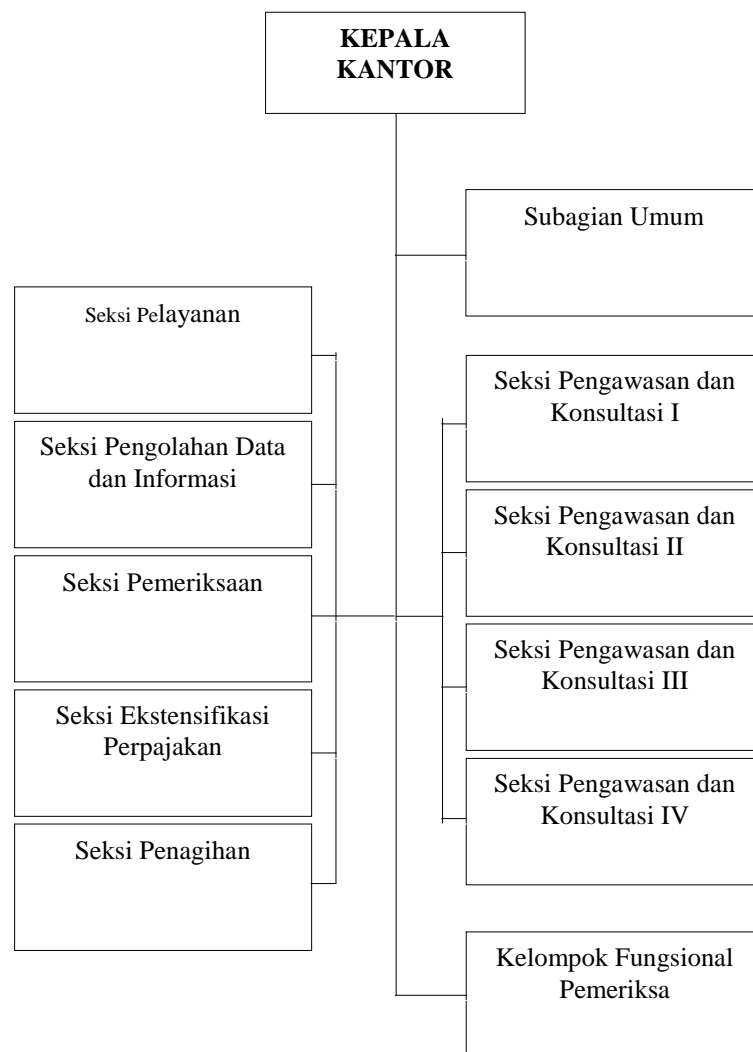
- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.

- 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
- 5) Verifikasi, pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi pajak.
- 6) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
- 8) Penerbitan NPWP dan Surat Ketetapan Pajak.
- 9) Pengurangan sanksi pajak.
- 10) Pelaksanaan administrasi.
- 11) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.

7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (2013).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membawahi 1 Sub Bagian Umum, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 96 (Sembilan puluh enam) Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 Pejabat Eselon IV.
 - b. 31 *Account Representative* yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 - c. 15 Fungsional Pemeriksa Pajak dalam dua Kelompok.
 - d. 2 Juru Sita Pajak Negara.
 - e. 36 Pelaksana yang terbagi pada Sub Bagian Umum dan seksi-seksi.
8. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Masing-masing organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki tugas-tugas yang sesuai dengan bidangnya. Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, bertugas:
 - 1) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas oleh para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

b. Sub Bagian Umum, bertugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bag Umum dibantu oleh:

- 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, bertugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian, dan laporan.
- 2) Koordinator Pelaksana Keuangan, bertugas membantu segala urusan yang berkaitan dengan keuangan dan penggajian pegawai.
- 3) Koordinator Pelaksana Rumah Tangga, bertugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan serta membantu anggaran rumah tangga kantor.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bertugas:

- 1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- 2) Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 3) Pelayanan dukungan teknis komputer.
- 4) Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*.
- 5) Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan SIG.
- 6) Penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan, bertugas:

- 1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- 2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksana registrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan.

e. Seksi Pemeriksaan, bertugas:

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, bertugas:

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembetulan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Penagihan, bertugas:

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 2) Melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

- 3) Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
- 4) Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
- 5) Melakukan evaluasi hasil pandang.

Untuk Kelompok *Account Representative (AR)*, secara khusus melayani Wajib Pajak secara personal.

i. Kelompok Fungsional Pemeriksa, bertugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kelompok Fungsional Pemeriksa terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasi oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor KPP Pratama dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu berupa data sebagai berikut:

- a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2012 pada KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
1	2010	61.483
2	2011	67.033
3	2012	71.780

Sumber: Seksi PDI (2013).

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2010 sebanyak 61.483 Wajib Pajak, tahun 2011 naik menjadi 67.033 Wajib Pajak, dan tahun 2012 naik menjadi 71.780 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 5550 Wajib Pajak atau 9,03% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 4747 Wajib Pajak atau 7,08% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011.

- b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 Tepat Waktu, pada KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 Tepat Waktu

No.	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1	2010	30.338
2	2011	37.304
3	2012	34.487

Sumber: Seksi PDI (2013).

Berdasarkan data dari Tabel 4, maka dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu mengalami fluktuasi. Pada tahun pajak 2010, terdapat 30.338 Wajib Pajak Orang Pribadi, tahun pajak 2011 terdapat 37.304 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan tahun pajak 2012 terdapat 34.487 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun pajak 2010 ke tahun pajak 2011 mengalami peningkatan sebesar 6966 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 22,96% dari 30.338 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2010, sedangkan pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2012 mengalami penurunan sebesar 2817 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 7,55% dari 37.304 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011.

c. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak PPh di KPP Pratama Yogyakarta.

1) Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih kurang

Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, bahkan ada yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ada juga sebagian Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Baru yang masih kurang pengetahuannya mengenai Tata Cara Perpajakan.

2) Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pajak

Masih banyak Wajib Pajak yang memandang negatif terhadap pajak dan petugas pajak karena adanya kasus-kasus mafia pajak. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun, sehingga banyak masyarakat (Wajib Pajak) yang bersikap tertutup dan menghindari pajak.

3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Yogyakarta

Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah banyak Wajib Pajak yang terdaftar. Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan

yang ada. Selain itu, terbatasnya SDM menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak.

d. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.

1) Agar kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan meningkat, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Penyuluhan perpajakan

Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan petugas pajak dengan mendatangi Wajib Pajak di dinas, lembaga, perusahaan, institusi dan instansi tertentu. Wajib Pajak juga bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atau petugas pajak yang mendatangi Wajib Pajak. Penyuluhan tidak langsung dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media *online*, dan media luar ruang.

b) Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan

Acara Pekan Panutan dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dalam rangka untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pekan panutan pelaporan SPT Tahunan PPh OP ini bertujuan untuk memberikan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat (Wajib Pajak) agar melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

c) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT Tahunannya dan melakukan membetulkan SPT jika terdapat kesalahan.

d) Sanksi perpajakan

KPP Pratama Yogyakarta menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas waktu berakhir. Jika surat teguran tersebut belum dipenuhi, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak).

Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan meningkatkan pelayanan, sosialisasi/penyuluhan dan berusaha untuk selalu transparan, berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenai segala hal diluar hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan.

3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP

Pratama Yogyakarta melakukan cara-cara sebagai berikut:

a) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan, seluruh petugas KPP Pratama Yogyakarta ikut berperan aktif menjadi petugas jaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Karena terbatasnya SDM, peserta PKL diikutsertakan untuk membantu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

b) *Drop Box*

Drop Box/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pusat keramaian seperti di pusat berbelanja atau di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Yogyakarta. Tujuan diadakannya *Drop Box* adalah memberi kemudahan kepada Wajib Pajak terkait dengan pelaporan SPT Tahunan.

c) Skala Prioritas bagi Wajib Pajak Baru dan Lama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menggali potensi Wajib Pajak Baru agar taat pajak dengan melakukan penyuluhan bekerja sama dengan KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan). KPP Pratama Yogyakarta juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Lama agar taat dan menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Pembahasan

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 5. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tepat Waktu

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1	2010	61.483	30.338
2	2011	67.033	37.304
3	2012	71.780	34.487

Sumber: Seksi PDI (2013).

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maka digunakan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

- 1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010.

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2010}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2010}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.338}{61.483} \times 100\%$$

$$= 49,34\%$$

2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011.

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2011}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2011}} \times 100\%$$

$$= \frac{37.304}{67.033} \times 100\%$$

$$= 55,65\%$$

3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012.

$$\frac{\text{Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2012}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2012}} \times 100\%$$

$$= \frac{34.487}{71.780} \times 100\%$$

$$= 48,05\%$$

Tabel 6. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010-2012

No.	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	Persentase
1	2010	61.483	30.338	49,34%
2	2011	67.033	37.304	55,65%
3	2012	71.780	34.487	48,05%
Rata-rata tingkat kepatuhan				51,01%

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta setiap tahunnya kurang

stabil dan belum terealisasi dengan baik. Keadaannya masih fluktuatif atau ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2012 adalah 49,34%, dan 55,65%, 48,05%. Peningkatan terjadi pada tahun pajak 2010 ke tahun pajak 2011 sebesar 6,31% dan penurunan terjadi pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2012 sebesar 7,6%.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2010-2012 digunakan dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkancana dan Sunartana (1983: 80).

Tabel 8. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010-2012

No.	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	Persentase	Kriteria
1	2010	61.483	30.338	49,34%	Rendah
2	2011	67.033	37.304	55,65%	Kurang
3	2012	71.780	34.487	48,05%	Rendah

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2010 sebesar 49,34%. Berdasarkan pedoman di atas, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2010 berada di antara 0-54% dengan skor standar rendah.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 sebesar 55,65% dan persentase tersebut berada di antara 55-64% dengan skor standar kurang.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2012 sebesar 48,05%, dan persentasenya berada di antara 0-54% dengan skor standar rendah.

b. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Yogyakarta.

1) Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan masih kurang

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan masih kurang. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu dikarenakan lupa, ada kesibukan lain, dan karena faktor lainnya. Bahkan ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ada juga sebagian Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Baru yang masih kurang pengetahuannya mengenai Tata Cara Perpajakan.

2) Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pajak

Masih banyak Wajib Pajak yang memandang negatif terhadap pajak dan petugas pajak karena adanya kasus-kasus mafia pajak. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun. Masyarakat berfikir untuk apa membayar pajak kalau pajak tersebut disalahgunakan, sehingga banyak masyarakat (Wajib Pajak) yang menghindari pajak, sulit untuk diajak kerja sama, menutupi informasi yang dimiliki, dan mengurangi utang pajak yang harus dibayar.

3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Yogyakarta

Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah banyak Wajib Pajak yang terdaftar. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada untuk melayani Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada. Wajib Pajak merasa jenuh karena harus menunggu antrian yang lama dan panjang sehingga Wajib Pajak menjadi malas, terlambat atau bahkan tidak mau melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu, terbatasnya SDM menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak.

c. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

1) Agar kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan meningkat, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Memberikan penyuluhan perpajakan.

Penyuluhan kepada Wajib Pajak Baru dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penyuluhan kepada Wajib Pajak Terdaftar dimaksudkan agar Wajib Pajak Terdaftar sadar pajak, peduli pajak, dan menjaga komitmen untuk terus taat pajak.

Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Penyuluhan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau keterangan mengenai perpajakan. Penyuluhan ini dapat dilakukan:

(a) Secara massal

Petugas pajak mendatangi Wajib Pajak di dinas, lembaga, perusahaan, institusi dan instansi tertentu. Sebelumnya, petugas pajak mengirimkan surat penawaran sosialisasi/ penyuluhan terlebih dahulu. Petugas pajak memberikan pengarahan dan bimbingan secara intensif kepada Wajib Pajak dengan memberi materi mengenai perpajakan. Selain itu, KPP Pratama Yogyakarta juga menyediakan buku petunjuk pengisian SPT Tahunan yang terlampir pada setiap Formulir SPT Tahunan.

(b) Secara personal

Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atau petugas pajak yang mendatangi Wajib Pajak. Tugas ini dilakukan oleh *Account Representative* dengan memberikan pengarahan mengenai permasalahan yang dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. Setiap *Account*

Representative mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib Pajak tersebut *Account Representative* berkewajiban untuk memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

(2) Penyuluhan secara tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media *online* (internet), dan media luar ruang (pemasangan baliho, spanduk, dsb).

Melalui penyuluhan, masyarakat (Wajib Pajak) akan mendapat informasi yang lebih jelas mengenai pajak dan mudah dipahami sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Sosialisasi dengan frekuensi informasi yang begitu sering diterima oleh masyarakat juga dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

b) Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan

Acara Pekan Panutan dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dalam rangka untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pekan panutan pelaporan SPT Tahunan PPh OP ini bertujuan untuk memberikan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak agar melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya, yaitu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Para pejabat-pejabat penting ini diharapkan menjadi teladan dan contoh yang baik bagi para warga masyarakat yang dipimpinnya.

c) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak

Jika menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT berdasarkan data - data yang ada di kantor pajak, maka KPP Pratama Yogyakarta membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta klarifikasi terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT Tahunannya dan melakukan membetulkan SPT jika terdapat kesalahan.

d) Sanksi perpajakan

KPP Pratama Yogyakarta menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas waktu berakhir. Jika surat teguran tersebut belum dipenuhi, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak)

Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan meningkatkan pelayanan melalui sosialisasi/penyuluhan dan menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan di Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk dan uang pajak disetor langsung oleh Wajib Pajak tanpa adanya interaksi dengan petugas pajak. Hal ini menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tidak menerima uang pajak dari Wajib Pajak, namun hanya menerima bukti setor atas pembayaran pajak tersebut. Uang pajak yang telah disetorkan ke bank akan masuk ke dalam kas negara dan selanjutnya dianggarkan untuk membiayai pengeluaran publik. KPP berusaha untuk selalu transparan, berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenai segala hal diluar hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan. KPP menganggap para Wajib Pajak sebagai satu keluarga yang sama-sama berkontribusi membangun keluarga besar Indonesia. Melalui transparansi APBN, Wajib Pajak dapat memantau berapa uang yang diterima dari pajak serta penggunaannya. Uang yang telah Wajib Pajak setorkan tersebut sama sekali tidak melalui tangan para pegawai pajak. Sedangkan mafia pajak adalah suatu konspirasi dalam mengecilkan uang pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak nakal dengan memberi uang pelicin kepada oknum pegawai pajak. Bagaimanapun

bentuknya, kecurangan tersebut pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga harus diberantas hingga tuntas. Adanya kasus mafia tersebut menjadi pelajaran bagi KPP Yogyakarta dan menjadi cambuk untuk introspeksi internal, meningkatkan kualitas pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang benar-benar percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP Pratama Yogyakarta melakukan cara-cara sebagai berikut:

a) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan, seluruh petugas KPP Pratama Yogyakarta ikut berperan aktif menjadi petugas jaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Setiap Seksi di KPP Pratama Yogyakarta menurunkan anggotanya untuk melayani Wajib Pajak secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena terbatasnya SDM, peserta PKL diikutsertakan untuk membantu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

b) *Drop Box*

Drop Box/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pusat keramaian

seperti di pusat perbelanjaan atau di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Yogyakarta. Tujuan diadakannya *Drop Box* adalah agar Wajib Pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT Tahunannya tanpa harus ke KPP setempat dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Selain itu Wajib Pajak juga bisa melaporkan SPT Tahunannya melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dan *e-Filling* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

c) Skala Prioritas bagi Wajib Pajak Baru dan Lama

Untuk mengawasi Wajib Pajak yang jumlahnya cukup banyak, maka KPP Pratama Yogyakarta menggali potensi Wajib Pajak Baru agar taat pajak dengan melakukan penyuluhan bekerja sama dengan KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan). KPP Pratama Yogyakarta juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Lama agar taat dan menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Yogyakarta Tahun Pajak 2010 sampai dengan Tahun Pajak 2012 adalah 49,34%, 55,65%, dan 48,05% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif. Peningkatan terjadi pada tahun pajak 2010 ke tahun pajak 2011 sebesar 6,31% dan penurunan pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2012 sebesar 7,6%.
2. Upaya Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu:
 - a. Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, diadakan pekan panutan pelaporan SPT Tahunan yang bertujuan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu, melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar segera menyampaikan dan membetulkan SPT Tahunannya, dan memberikan sanksi pajak.

- b. Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak)

Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan meningkatkan pelayanan, sosialisasi/penyuluhan dan berusaha untuk selalu transparan, berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenai segala hal diluar hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan.

- c. Partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL), *Drop Box*, dan skala prioritas. Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi, *e-Filling* pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada KPP Pratama Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penyuluhan/sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak baru yang masih minim pengetahuannya tentang pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh Wajib Pajak, diharapkan Wajib pajak akan paham dan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, petugas pajak, penggunaan pajak serta meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara petugas

pajak/KPP dan masyarakat (wajib pajak), sehingga kegiatan pembayaran/pelaporan pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak, tuntutan “transparansi” menjadi hal yang absolut. Jika diumpamakan Indonesia adalah sebuah struktur rumah tangga, transparansi merupakan transformasi dari dua unsur keharmonisan rumah tangga yang paling penting, yaitu komunikasi yang jujur serta kepercayaan. KPP harus tetap berusaha berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenai segala hal diluar hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan. KPP harus tetap menganggap para Wajib Pajak sebagai satu keluarga yang sama-sama berkontribusi membangun keluarga besar Indonesia. KPP memberi WP kepercayaan serta bersikap transparan dengan harapan agar WP mempercayai KPP melalui dukungan dan partisipasi aktif secara nyata dalam rangka pembayaran atau pelaporan pajak. Selain itu WP akan bersikap lebih transparan dengan kesediaan memberikan informasi sebenar-benarnya.

3. Meningkatkan kinerja petugas pajak dengan memberikan pelatihan serta mutasi pegawai pajak untuk penyesuaian beban kerja supaya SDM berbanding lurus dengan jumlah Wajib pajak yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak. Petugas Pajak harus tetap memiliki semangat yang besar dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Dengan mengutip sebuah kalimat yang sangat menginspirasi di novel “Negeri 5 Menara”, yaitu Man jadda wajada, apabila pegawai Direktorat Jenderal Pajak bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi instansi yang bersih dan dipercaya masyarakat akan dapat terwujud. Seperti yang kita ketahui, masyarakat mengharapkan pelayanan yang sepenuh hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Casavera. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dapan, M. Kes et. al. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Kulon Progo: UNY Kampus Wates.
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. (2010). *Cara Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. (2013). *Profil KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta: KPP Pratama Yogyakarta.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. (2004). *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. S. R. (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Wayan Nurkancana dan P. P. N. Sunartana. (1983). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Direktorat Jendral Pajak. (2012). Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012. Diakses di <http://pajak.go.id/> pada tanggal 30 Maret 2013.

Safri Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. Diakses di <http://books.google.co.id>. pada tanggal 16 April 2013.

<Http://elib.unikom.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2013.

LAMPIRAN

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S – 146 /WPJ.23/BD.0503/2013
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

23 Mei 2013

Yth. Kepala KPP Pratama Yogyakarta
Jalan Panembahan Senopati No. 20
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) nomor 315/UN34.18/DT/2013 tanggal 02 Mei 2013 hal Permohonan Ijin Penelitian atas :

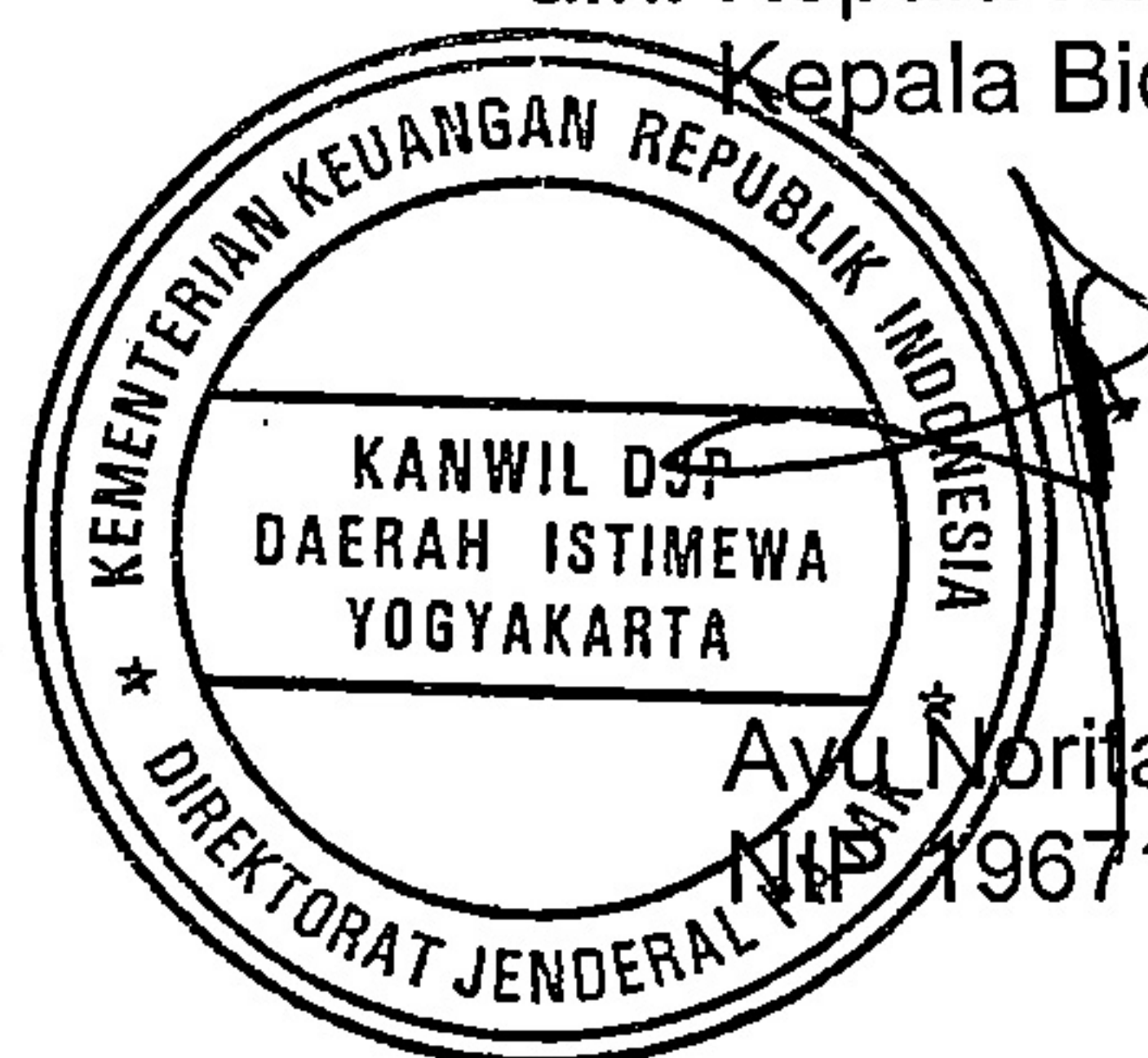
Nama/NPM	: Ensiwi Hidayati
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Judul skripsi	: Evaluasi Tingkat Kepatuhan WP OP Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2010-2012 di KPPP Yogyakarta

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP D.I. Yogyakarta
Kepala Bidang P2Humas



Ayu Norita Wuryansari
NIP. 196711181995032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

70

JALAN PANEMBAHAN SENOPATI NO. 20, YOGYAKARTA – 55121
TELEPON: (0274) 373403, 380415; FAKSIMILE: (0274) 380417; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK: (021) 500200;
EMAIL: pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-196/WPJ.23/KP.0201/2013
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Pemberian Izin Penelitian

28 Mei 2013

Yth. Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates
Jalan Bhayangkara No.7 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Saudara Nomor : 315/UN34.38/DT/2013 tanggal 29 April 2013 Hal Permohonan Izin Penelitian dan surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta Nomor : S-146/WPJ.23/WPJ.23/BD.0503/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang menyetujui izin penelitian atas :

Nama : Ensiwi Hidayati
NIM : 10409131037
Program Studi : D-3 Akuntansi
Universitas : Unieversitas Negeri Yogyakarta
Judul : Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

dengan ini disampaikan bahwa KPP Pratama Yogyakarta memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat, digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Sdr. Ensiwi Hidayati
Unieversitas Negeri Yogyakarta

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TITIK HITAM

• BERI TANDA "X" PADA

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP		
	NAMA WAJIB PAJAK		
	PEKERJAAN		
	NO. TELEPON		NO. FAKS
	PERUBAHAN DATA	LAMPIRAN TERSENDIRI	TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian: lihat buku petunjuk hal. 3)			
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain)	1	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A)	2	
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)	3	
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4 - 5)	6	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ KI K/II PH/ HB/	7	
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9	
	10. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7))	12	
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13	
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI	14a 14b 14c	
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15	
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) <input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 29 A) 17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon: a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH) d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)	16 17	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	18	
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri e. <input type="checkbox"/>		
<p>PERNYATAAN</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p><input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL</p> <p>TGL BLN THN</p> <p>NAMA LENGKAP :</p> <p>NPWP :</p>			

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
		(Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
Angka 2**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
		(Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir
Induk 1770 S Bagian D Angka 12**Catatan :**

- *) DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
- (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-I

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTANGGUNG JAWAB NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUNYAN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
	JUMLAH BAGIAN A	JBA	

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
	JUMLAH BAGIAN B	JBB		

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
	JUMLAH BAGIAN C	JBC		

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

FORMULIR

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA
KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

TAHUN PAJAK

2 0

☐ SPT PEMBETULAN KE...

- PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS	NPWP													
	NAMA WAJIB PAJAK													
	PEKERJAAN	KLU :												
	NO. TELEPON							NO. FAKSIMILI :						
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA												

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN > Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN > Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANGGAL TGL BLN THN

TANDA TANGAN

*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

- Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan "ke ..." diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan "ke ..." tersebut tidak perlu diisi.
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak wajib melampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kolom identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Misalnya : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

FORMULIR	1770 SS		SPT TAHUNAN	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
	YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI		TAHUN PAJAK	
			2 0 1 2	
	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...			

PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

• LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS	NPWP	1 7 1 2 3 4 5 6 7 9 4 5 0 0 0												
	NAMA WAJIB PAJAK	H . S Y A M S U D D I N												
	PEKERJAAN	S T A F F												
	NO. TELEPON	0 2 1 5 6 5 6 4 8 7 9						NO. FAKSIMILI :	0 2 1 5 6 5 6 4 8 0 0					
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA												

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN > Rp. 35.000.000

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN > Rp. 12.000.000

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANGGAL TGL BLN THN

TANDA TANGAN *H. Syamsuddin*

*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, termasuk utang bunga.

Misalnya : pinjaman bank atau koperasi

MEMPUYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

2 0

73

☐ BL ☐ TH
☐ NORMA☐ BL ☐ TH
☐ PEMBUKUAN☐ SP1 PEMBETULAN KE -

PERHATIAN

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA 'X' DALAM

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	
NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	KLU :
NO. TELEPON/FAKSIMILI	
PERUBAHAN DATA	LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai decimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

	RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5)	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5)	2
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3)	3
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)	4
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/W P/W HB/	10
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)	11
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7)	15
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	17a
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17b
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17c
	c. FISKAL LUAR NEGERI	18
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b + 17c)	18	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS tgl bln thn	19
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 29 A)	
	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 12.b mohon:	
	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)	
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)		
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21
	DIHITUNG BERDASARKAN :	
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU		
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI HARUS DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
	b. <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPLN)
	c. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI/REKAPITULASI BUKTI ALIH PEREDARAN 9RUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUYAI NPWP SENDIRI
	d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
	e. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. <input type="checkbox"/>
	f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)	l. <input type="checkbox"/>

PERNYATAAN:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berituhkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA TANGGAL:

NAMA LENGKAP :

NPWP :

1770 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGUNAKAN PEMBUKUANs.d
BL TH BL TH
☐ NORMA ☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT OPINI AKUNTAN : ☐ TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

RUPIAH

1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :

- a. PEREDARAN USAHA
b. HARGA POKOK PENJUALAN
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
d. BIAYA USAHA
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

1a
1b
1c
1d
1e

2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

- a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
c. PENGgantian ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
f. PAJAK PENGHASILAN
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
h. SANKSI ADMINISTRASI
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
2k
2l

3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:

- a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)

3a
3b
3c
3d

4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

4

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

1770 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN
- NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL

TH

BL

TH

☐ NORMA☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - ☐ dari ☐ halaman Lampiran-II

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15. dst						
JUMLAH BAGIAN A						JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *)
- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari - halaman Lampiran-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

s.d
BL TH BL TH
☐ NORMA ☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun yang dibayar sekaligus		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

s.d.

BL

TH

BL

TH

☐ NORMA☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYUKAI, DAPAT DIBALUT SENCUP SESUAI DENGAN BENTUK INI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan penggunaan Kepada Yth :
Norma Penghitungan Kepala KPP Pratama Yogyakarta
Jl. P. Senopati No. 20
Di-
YOGYAKARTA

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 telah diubah dengan Nomor 36 Tahun 2008 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

Nama :
Alamat :
N P W P :

memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode Nomor :

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

()

Lembar I untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II untuk : Wajib Pajak

RINGKASAN CATATAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO

TAHUN

(Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan)

N A M A	:
NPWP	:
ALAMAT	:

NO	BULAN	Jumlah Peredaran / Penerimaan Bruto	Keterangan
1	JANUARI	Rp.	
2	FEBRUARI	Rp.	
3	MARET	Rp.	
4	APRIL	Rp.	
5	MEI	Rp.	
6	JUNI	Rp.	
7	JULI	Rp.	
8	AGUSTUS	Rp.	
9	SEPTEMBER	Rp.	
10	OKTOBER	Rp.	
11	NOVEMBER	Rp.	
12	DESEMBER	Rp.	
JUMLAH		Rp.	

CATATAN :
Harap Dilampirkan pada
SPT PPh Tahun

.....
Wajib Pajak yang bersangkutan

FORMULIR

1721-A1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

TAHUN KALENDR
1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

74
20

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :
Jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP :
JABATAN :
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. JUMLAH (1 s.d. 6)

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

PENGURANGAN :

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/ JHT

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

23. JUMLAH PPh PASAL 21 :
a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

RUBIAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK

KUASA

(tempat)

TGL

BLN

THN

NAMA LENGKAP

NPWP

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

2

0

NOMOR URUT	:	
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN	:	
NPWP BENDAHARA	:	
NAMA BENDAHARA	:	
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN	:	
NIP / NRP	:	
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN	:	
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN	:	
PANGKAT / GOLONGAN	:	
JABATAN	:	
STATUS DAN JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K / <input type="checkbox"/> TK / <input type="checkbox"/> HB / <input type="checkbox"/>
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	:	<input type="checkbox"/> S.D <input type="checkbox"/>

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI POKOK / PENSIUN
2. TUNJANGAN ISTERI
3. TUNJANGAN ANAK
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)

• PENGURANGAN

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
20. JUMLAH PPh PASAL 21 :

☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)B. • PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

BENDAHARA

NAMA

NIP/NRP

(Tempat)

TGL

BLN

THN

Tanda Tangan dan Cap

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

UNTUK WAJIB PAJAK

Nomor : 542 - 04 - 0 0001929

NPWP : _____

NAMA :

STATUS : LB / KB / N

TAHUN PAJAK : _____ 2012

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH
SEPAJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
Jl. Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 4333940

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

UNTUK DITEMPEL DI AMPLOP

Nomor : 542 - 04 - 0 0001929

NPWP : _____

NAMA :

STATUS : LB / KB / N

TAHUN PAJAK : _____ 2012

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH
SEPAJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN
Jl. Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 4333940

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

UNTUK ARSIP

Nomor : 542 - 04 - 0 0001929

NPWP : _____

NAMA :

STATUS : LB / KB / N

TAHUN PAJAK : _____ 2012

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH
SEPAJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



Bukti Penitipan SPT secara Kolektif

BUKTI PENITIPAN SPT SECARA KOLEKTIF

Pada hari ini, tanggal telah diterima SPT Tahunan yang disampaikan secara kolektif oleh:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

dengan perincian sebagai berikut:

Kategori	Jumlah
SPT Tahunan karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta	
SPT Tahunan karyawan yang tidak terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta	
Total	

Penerima SPT,

Jabatan :

()

Penyerah SPT,

Institusi :

Jabatan :

()